

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bangunan pemerintahan dan fasilitas kolonial di Indonesia sangat berkaitan dengan proses perluasan kekuasaan Belanda. Di Sumatra, penguatan kontrol Belanda dilakukan melalui dominasi politik dan ekonomi, pembentukan wilayah administratif, dan pelibatan *elite lokal* dalam sistem pemerintahan kolonial¹. Bangunan kolonial tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan, pusat pelayanan administrasi, dan sarana untuk mengendalikan masyarakat setempat. Di Mandailing, pengalaman kolonial memiliki karakter khusus karena terjadi bersamaan dengan perubahan sosial, politik, keagamaan, dan identitas masyarakat.²

Wilayah Mandailing, pengalaman kolonial memiliki karakter khusus karena terjadi bersamaan dengan perubahan sosial, politik, keagamaan, dan identitas masyarakat. Intervensi Belanda menguat setelah Perang Padri, kemudian mengubah hubungan masyarakat Mandailing dengan kekuasaan

¹ Tomy Wijaya dan Fatimah Alauwiyah, "Transformasi Tata Kelola Marga Di Sumatera Selatan: Analisis Komparatif Era Kolonial Belanda Dan Republik Indonesia, 1825-1983" *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No 3 (2025), hal. 514-523

² Agus Kurniawan, "Konsep Pelestarian Bangunan Kolonial di Jalur Belanda Menuju Singaraja, Kota Warisan Budaya" *Prosiding Konferensi Internasional Warmadewa ke-1 tentang Sains, Teknologi dan Kemanusiaan*, Vol. 7, No.8 (2021)

kolonial serta mempengaruhi tata ruang sosial mereka³. Pada awal abad ke-20, masyarakat Mandailing menunjukkan respons aktif terhadap kolonialisme. Mereka terlibat dalam pendidikan modern, organisasi kemasyarakatan, dan aktivitas sosial-politik. Hal ini menunjukkan bahwa Mandailing bukan hanya wilayah yang didominasi secara sepihak oleh Belanda, tetapi merupakan ruang negosiasi, perlawanan, dan transformasi sosial⁴.

Salah satu peninggalan fisik yang menonjol namun belum banyak terungkap jejak sejarahnya yaitu bangunan “Pasanggrahan Kotanopan”. Dinamai “Pasanggrahan Kotanopan” didasarkan pada makna dan konteks kata dalam sejarah dan arsitektur tradisional Indonesia. Pasanggrahan berasal dari kata Jawa Kuna “*sanggraha*”⁵, yang berarti tempat untuk berkumpul atau beristirahat. Secara sederhana, pasanggrahan merupakan bangunan atau fasilitas yang digunakan untuk tempat istirahat atau singgah, biasanya digunakan keluarga kerajaan atau pejabat tinggi. Dalam sejarah, pasanggrahan biasanya berfungsi sebagai tempat istirahat sementara, tempat singgah sementara, atau penginapan resmi bagi bangsawan atau pejabat pemerintah pada masa kerajaan

³ Abdur-Razzaq Lubis, “Mandailing Islam across Borders” *Taiwan Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 2, No.2 (2005), hal. 55-98

⁴ Ja'far, “Menemukan Warisan Mandailing, Ulama: Pendidikan, Kaum Intelektual, dan Politik di Amerika Utara Sumatra pada Awal Abad ke-20” *Studi Islam yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Mataram*, Nomor. 2 (2022), hal. 296-336

⁵ Bahasa Jawa Kuna, adalah bentuk awal bahasa Jawa yang digunakan di Nusantara selama kerajaan Hindu- Buddha dari abad ke-8 hingga abad ke-15. Bahasa ini adalah bahasa sastra klasik yang digunakan dalam tulisan agama, sejarah, dan sastra pada masa itu. Bahasa Jawa Kuna, yang biasanya digunakan dalam karya sastra, kitab suci, prasasti, dan dokumen resmi kerajaan, berbeda dengan bahasa Jawa modern karena pemahaman, tata bahasa, dan strukturnya yang lebih kompleks. Selain itu, bahasa ini banyak dipengaruhi oleh bahasa Sansekerta. Bahasa Kawi dianggap sebagai bahasa luhur yang menggambarkan tradisi dan budaya intelektual orang Jawa kuno.” Putu Gede Budhi Danaswara dan Ni Diah Purnamawati, “ Transformasi Kakawin Bharata Yuddha ke Dalam Pertunjukan Wayang Kulit Parwa Lakon Jayadrata Antaka Dalang I Made Sidja,” *jurnal IPGB Danaswara*, (2022)

dan kolonial. Bangunan yang disebut Pasanggrahan biasanya berfungsi sebagai tempat resor atau vila yang nyaman untuk bersantai, jauh dari hiruk pikuk aktivitas administrasi kerajaan atau pemerintahan. Dari segi arsitektur, pasanggrahan dibangun dengan tata ruang dan keindahan yang mendukung tujuan tersebut, seringkali mengelilingi taman yang asri dan suasana tenang⁶.

Nama Pasanggrahan Kotanopan diberikan secara khusus karena Pasanggrahan, atau rumah singgah, merupakan salah satu infrastruktur vital yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bangunan ini dibangun sebagai tempat peristirahatan bagi para pejabat, kontrolir, atau asisten residen yang melakukan perjalanan dinas ke wilayah-wilayah pedalaman. Keberadaannya di Kotanopan menandakan posisi strategis wilayah ini dalam konstelasi⁷.

Administrasi dan ekonomi kolonial pada masanya. Gedung ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perjuangan kemerdekaan, sehingga namanya terkait erat dengan peristiwa sejarah lokal yang penting.⁸ Pasanggrahan Kotanopan berada di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pasanggrahan ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930 dan awalnya berfungsi sebagai tempat persinggahan pejabat Belanda yang

⁶ Ira Mentayani & Mansyur, *Pesanggrahan Mandiingin : Kajian Sejarah dan Arsitektur Bangunan Hindia Belanda di Bukit Besar Mandiingin* (Yogyakarta : Arti Bumi Intaran (Anggota IKAPI), 2020) ,hal. 3-4

⁷ Khusnul Khofifah Harahap, dkk, *Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah)* (Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2020), hal. 12-13

⁸ M.L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hal. 72.

bekerja di daerah tersebut. Bangunan ini juga menjadi saksi penting dalam sejarah perjuangan Sumatera untuk kemerdekaan Indonesia⁹.

Masa revolusi kemerdekaan, bangunan ini mengalami perkembangan yang signifikan. Pasanggrahan Kotanopan pernah digunakan sebagai lokasi pertemuan penting yang melibatkan tokoh nasional, termasuk Presiden Soekarno datang ke Pasanggrahan Kotanopan dalam kegiatan yang berkaitan dengan perjuangan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa penting yang dikaitkan dengan bangunan ini adalah kunjungan Presiden Soekarno pada 16 Juni 1948¹⁰.

Diadakannya rapat di Pasanggrahan Kotanopan karena fasilitas Pasanggrahan yang dibangun luas cocok untuk pertemuan yang dihadiri oleh ratusan tokoh pejuang. Bangunan ini menjadi simbol penting dari warisan sejarah dan budaya Mandailing Natal. Ini menunjukkan bentuk arsitektur kolonial Belanda berhubungan dengan perubahan sosial dan politik di tingkat lokal dan nasional. Bangunan yang berarsitektur Kolonila ini masih bisa diamati dan tetap berdiri hingga hari ini yang dikelola oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara¹¹. Dengan fungsi Pasanggrahan Kotanopan yang berubah menunjukkan dinamika hubungan kekuasaan antara kolonialisme dan negara nasional. Struktur kolonial dinegosiasikan ulang dalam konteks identitas lokal Mandailing

⁹ Iskandar Hasibuan. "Perayaan Kemerdekaan di Mandailing Natal". mandailing Pos Online. <https://malintangpos.co.id/perayaan-kemerdekaan-di-mandailing-natal-1/> di akses 13 oktober 2025

¹⁰ Dinas Sejarah, Kodim II Bukit Barisan, *Sejarah perang kemerdekaan di Sumatera, 1945-1950 (Indonesia Angkatan Darat*. Komando Daerah Militer-II Bukit Barisan. Dinas Sejarah, 2007), hal.234

¹¹ Kota Nopan Jadi Pusat Pelaksanaan Hari Pahlawan di Mandailing Natal," <https://madinapos.com/2021/11/10/kota-nopan-jadi-pusat-pelaksanaan-hari-pahlawan-di-mandailing-natal/> (di akses, Rabu 4, februari 2026)

Natal. Bangunan ini menjadi aset penting Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan sejarah daerah Mandailing Natal¹².

Keterlibatan tenaga kerja atau tokoh lokal dalam pembangunan tersebut belum dapat dipastikan karena belum ditemukan sumber yang jelas. Tidak banyak dicatat tentang tokoh lokal yang ikut serta dalam pembangunan Pasanggrahan Kotanopan pada tahun 1930. Namun, diketahui bahwa pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda mengawasi beberapa pembangunan dan pengelolaan di wilayah Mandailing Natal, termasuk Kotanopan yaitu Pasanggrahan. Oleh karena itu, orang-orang lokal mungkin terlibat dalam proyek tersebut sebagai pejabat adat atau tokoh masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial untuk menyuksekannya.

Pasanggrahan Kotanopan masih dimanfaatkan sebagai tempat penginapan serta menjadi salah satu bangunan yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal hingga saat ini. Pemanfaatan tersebut antara lain terlihat dari penggunaan Pasanggrahan sebagai tempat menginap bagi peserta kegiatan yang berlangsung di wilayah tersebut. Depan Pasanggrahan juga terdapat Tugu Perintis Kemerdekaan yang memuat nama-nama tokoh pejuang Mandailing Natal. Keberadaan tugu tersebut turut memperkuat nilai

¹² Muhammad , *Sejarah Seni Rupa Sumatera Utara Kajian Kehidupan Seni Rupa Di Medan Tahun 1945-2005* (banda aceh : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2007), hal. 71

historis kawasan Pasanggrahan sebagai bagian dari sejarah perjuangan dan identitas daerah.

Pasanggrahan Kotanopan dalam perkembangan sejarah Mandailing Natal. Transformasi fungsi bangunan ini mencerminkan perubahan konteks sosial-politik serta cara masyarakat memaknai bangunan bersejarah sebagai bagian dari identitas kolektif dan memori sejarah lokal. Penelitian ini sangat penting untuk merekonstruksi sejarah berdirinya Pasanggrahan Kotanopan dan perubahan fungsinya dari tahun 1930 hingga 2013. Diharapkan bahwa penelitian ini tidak hanya memperkaya pengetahuan tentang sejarah lokal Mandailing Natal, tetapi juga meningkatkan pemahaman kita tentang bangunan bisa berubah dalam konteks sosial dan politik Indonesia¹³.

Selama bertahun-tahun, penelitian tentang pasanggrahan di Indonesia telah banyak dilakukan, termasuk penelitian tentang Pasanggrahan Mandiangan dan bangunan kolonial lainnya. Namun, penelitian khusus tentang Pasanggrahan Kotanopan masih sangat terbatas dan belum mempelajarinya secara menyeluruh dari perspektif sejarah, fungsinya, dan ingatan masyarakatnya. Akibatnya, penelitian ini sangat penting untuk mengisi celah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri kembali informasi yang hilang ataupun mulai redup dikalangan masyarakat yang akan digabungkan menjadi cerita sejarah yang lengkap.

¹³ nanang setiawan. "Ruang Tanpa Batas: Sejarah Dan Politik Memori Pada Public Space Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949". *Magister Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada*. hal. 186

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sejarah berdirinya Pasanggrahan Kotanopan pada masa kolonial Hindia Belanda ?
- b. Bagaimana fungsi Pasanggrahan Kotanopan mulai dari masa Penjajahan - Revormasi ?
- c. Apa saja faktor yang mempengaruhi fungsi pasanggrahan Kotanopan ?

Supaya pembahasan tidak mengambang dari batasan masalah, maka penulis membatasi ini sebagai berikut:

a. Batasan temporal

Penelitian ini difokuskan dari tahun 1930 dipilih sebagai batas awal penelitian karena merupakan tahun pembangunan asanggrahan Kotanopan. Hingga perkembangannya Pada tahun 2013, bangunan ini mulai digunakan sebagai penginapan dibuka untuk umum, yaitu merupakan tahun batasan penulis melakukan penelitian. Kurun waktu ini dipilih untuk memfokuskan penelitian pada jejak sejarah pasanggrahan kotanopan di mandailing natal.

b. Batasan spasial

Batasan spasial adalah batasan yang didasarkan pada kesatuan wilayah geografis atau tempat penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada bangunan Pasanggrahan Kotanopan yang terletak di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

c. Batasan Tematis

Penelitian ini dibatasi secara ketat pada tinjauan sejarah. Fokusnya adalah pada sejarah peristiwa, dan Perkembangan Pasanggrahan setiap periode yang terjadi di Indonesia.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan sejarah berdirinya Pasanggrahan Kotanopan pada masa kolonial Hindia Belanda
- b. Menganalisis fungsi Pasanggrahan Kotanopan mulai dari masa Penjajahan - Revormasi
- c. Mendeskripsikan faktor faktor yang mempengaruhi fungsi Pasanggrahan Kotanopan

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengungkap sejarah berdirinya Pasanggrahan Kotanopan pada masa kolonial Hindia Belanda
- b. Untuk mengetahui fungsi-fungsi Pasanggrahan Kotanopan mulai dari masa Penjajahan - Revormasi

- c. Mengungkap faktor apa saja yang mempengaruhi fungsi Pasanggrahan Kotanopan

D. Penjelasan Judul

Judul “Sejarah dan Fungsi Pasanggrahan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 1930–2013” dipilih untuk mengkaji keberadaan dan perkembangan fungsi Pasanggrahan Kotanopan sebagai salah satu bangunan yang memiliki nilai sejarah di wilayah Mandailing. Penelitian ini tidak hanya membahas Pasanggrahan sebagai peninggalan masa kolonial, tetapi juga menelusuri perubahan fungsi bangunan dalam berbagai periode sejarah Indonesia hingga tahun 2013. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang mencakup latar belakang pendirian, fungsi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi Pasanggrahan Kotanopan¹⁴.

“Sejarah” dalam penelitian ini merujuk pada kajian mengenai latar belakang dan proses berdirinya Pasanggrahan Kotanopan pada tahun 1930 serta perkembangannya dalam konteks periode sejarah Indonesia. Tahun 1930 dipilih sebagai batas awal penelitian karena merupakan tahun berdirinya Pasanggrahan Kotanopan. Sejak didirikan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, bangunan ini mengalami berbagai

¹⁴ Yulia Nurliani Lukito dan Amalia Nurul Rizky, ” Menggali masa lalu kota melalui pelestarian bangunan bersejarah” *Menggali masa lalu kota melalui pelestarian bangunan bersejarah*, Vol. 1, No. 1 (2017), hal. 1-8

perubahan sesuai kondisi politik, pemerintahan, dan sosial masyarakat pada setiap periode¹⁵.

Istilah “Fungsi” mengacu pada bentuk pemanfaatan Pasanggrahan Kotanopan sejak didirikan hingga tahun 2013. Pada awalnya, Pasanggrahan digunakan sebagai tempat persinggahan pejabat kolonial dalam perjalanan dinas. Dalam perkembangannya, fungsi tersebut mengalami perubahan mengikuti kebutuhan pemerintahan dan masyarakat pada setiap periode. Hingga tahun 2013, Pasanggrahan mulai dimanfaatkan sebagai penginapan yang digunakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis dinamika fungsi Pasanggrahan serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi.

“Pasanggrahan Kotanopan” merupakan objek utama dalam penelitian ini, bangunan pasanggrahan yang berada di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Secara historis, Kotanopan merupakan bagian wilayah Tapanuli Selatan pada masa Kolonial Hindia Belanda. Letaknya yang berada dalam jalur pergerakan pemerintahan dan ekonomi pada masa Belanda menjadikan Pasanggrahan memiliki peranan dalam menunjang aktivitas perjalanan dan pemerintahan pada masanya¹⁶.

¹⁵Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1974)

¹⁶ Yusni Khairul Amri, *kearifan lokal Adat Istiadat Tapanuli Selatan* (Jawa Timur : Kun Fayakun Anggota Ikapi, 2018), hal. 3

Adapun rentang waktu “1930–2013” merupakan batas temporal penelitian. Tahun 1930 dipilih sebagai titik awal karena menandai berdirinya Pasanggrahan Kotanopan masa Kolonial Hindia Belanda. Sementara itu, tahun 2013 dijadikan batas akhir karena pada periode tersebut Pasanggrahan mulai dimanfaatkan sebagai penginapan yang terbuka untuk masyarakat umum. Rentang waktu tersebut perubahan fungsi Pasanggrahan secara dari masa kolonial hingga masa otonomi daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kedudukan Pasanggrahan Kotanopan sebagai bangunan bersejarah sekaligus sebagai bangunan yang mengalami perubahan pemanfaatan sesuai dengan perkembangan zaman.

“Sejarah dan Fungsi Pasanggrahan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 1930–2013” menjelaskan kajian mengenai perjalanan historis Pasanggrahan Kotanopan sejak didirikan pada tahun 1930 hingga tahun 2013 serta perubahan fungsi yang terjadi dalam rentang waktu tersebut. Penelitian ini tidak hanya membahas Pasanggrahan sebagai bangunan peninggalan masa kolonial, tetapi juga menelusuri latar belakang pendiriannya, perkembangan fungsi pada berbagai periode pemerintahan, serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan fungsi tersebut. Dengan demikian, Pasanggrahan Kotanopan merupakan bangunan bersejarah yang keberadaannya mengalami perubahan fungsi seiring dengan perubahan politik, pemerintahan, dan kebutuhan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan pasanggrahan di antaranya dijelaskan oleh Ira dan Mansyur pada bukunya *“Pesanggrahan Mandiingin : Kajian Sejarah dan Arsitektur Bangunan Hindia Belanda di Bukit Besar Mandiingin”* bahwasanya dalam sejarah, pasanggrahan biasanya berfungsi sebagai tempat istirahat sementara, tempat singgah sementara, atau penginapan resmi bagi bangsawan atau pejabat pemerintah pada masa kerajaan dan kolonial. Bangunan yang disebut pasanggrahan biasanya berfungsi sebagai tempat resor atau vila yang nyaman untuk bersantai, jauh dari hiruk pikuk aktivitas administrasi kerajaan atau pemerintahan. Dari segi arsitektur, pasanggrahan dibangun dengan tata ruang dan keindahan yang mendukung tujuan tersebut, seringkali mengelilingi taman yang asri dan suasana tenang¹⁷.

Khusnul Khofifah Harahap, dkk, menuliskan dalam artikelnya yang berjudul *“Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah)”* menjelaskan bahwa nama “Pasanggrahan” diberikan secara khusus karena merupakan salah satu infrastruktur vital yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bangunan ini dibangun sebagai tempat peristirahatan bagi para pejabat, kontrolir, atau asisten residen yang melakukan perjalanan dinas ke wilayah-wilayah pedalaman.

¹⁷ Mentayani dan Mansyur, *op.cit.* , hal. 3-4

Keberadaannya di Kotanopan menandakan posisi strategis wilayah ini dalam konstelasi administrasi dan ekonomi kolonial pada masanya.

Soekmono dalam artikelnya yang berjudul "*Dimensi Teknik Arsitektur*" yaitu mengenai perkembangan wilayah Sumatera pada masa kolonial menjelaskan bagaimana ekspansi administrasi Belanda menjangkau wilayah pedalaman dan membangun infrastruktur pendukung pemerintahan. Hal ini relevan untuk memahami posisi Kotanopan dalam jaringan administrasi kolonial di Tapanuli Bagian Selatan. Selain itu, penelitian mengenai bangunan kolonial di luar Jawa menunjukkan bahwa banyak bangunan yang mengalami perubahan fungsi setelah kemerdekaan sebagai bagian dari adaptasi terhadap kebutuhan pemerintahan daerah .¹⁸

Yulianto Sumalyo pada bukunya yang berjudul "*Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia*" membahas tentang Pasanggarahan Kotanopan telah berubah yang fungsi awalnya sebagai tempat peristirahatan pejabat kolonial Belanda menjadi situs bersejarah, tempat wisata budaya, dan pusat pelestarian nilai perjuangan kemerdekaan di Kabupaten Mandailing Natal setelah kemerdekaan. Bangunan ini menjadi simbol penting dari perjuangan nasional setelah kemerdekaan, terutama karena pernah menjadi tempat pertemuan besar Presiden Soekarno pada 16 Juni 1948, yang bertujuan

¹⁸Soekmono, " Dimensi Teknik Arsitektur" *Institut Teknologi Bandung* Vol. 42 No.1 (2014)

untuk mempersatukan rakyat Sumatera yang menghadapi ancaman pembebasan diri¹⁹.

Namun, penelitian yang secara khusus membahas tentang sejarah dan perkembangan fungsi Pasanggrahan Kotanopan masih sangat terbatas. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitik beratkan pada sejarah dan arsitektur pasanggrahan secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji sejarah berdirinya serta dinamika fungsi Pasanggrahan Kotanopan dari tahun 1930 hingga 2013. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hasil penelitian di atas. Oleh karena itu, penelitian ini berfungsi sebagai studi sejarah lokal. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi berdirinya Pasanggrahan Kotanopan dan melihat bagaimana bangunan ini berkembang dan berfungsi dari masa kolonial hingga tahun 2013. Menggunakan sumber primer dan sekunder yang tersedia.

F. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan langkah langkahnya sebagai berikut :

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *heuriskein* , yang berarti menemukan atau memperoleh. Dalam konteks metode penelitian, heuristik merupakan keterampilan, teknik, dan proses sistematis untuk

¹⁹ Yulianto Sumalyo, *Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjha Mada Ekspres, 2017), hal. 89

mencari, mengumpulkan, serta menghimpun sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik, permasalahan dalam penelitian²⁰. Seperti yang dinyatakan Kuntowijoyo bahwa heuristik merupakan tahap pertama dalam penelitian sejarah yang menuntut daya kritis peneliti untuk menemukan jejak-jejak sejarah baik di lembaga arsip, perpustakaan, maupun melalui pelaku atau saksi sejarah²¹.

Sejalan dengan itu, Renier mendeskripsikan heuristik sebagai seni pencarian bukti sejarah, di mana peneliti berperan layaknya seorang detektif yang melacak berbagai petunjuk, baik tertulis maupun tidak tertulis, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan historiografis²². Dengan demikian Tahapan ini sangat penting karena bergantung pada ketersediaan jejak-jejak masa lalu. Tanpa sumber sejarah yang berhasil ditemukan, rekonstruksi peristiwa masa lalu tidak dapat dilakukan secara ilmiah .

Penulis membagi proses pencarian dan penemuan sumber menjadi dua tahap, yaitu mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu berupa Arsip kolonial seperti *Memorie van Overgave*, dokumen sezaman, foto-foto tua dan catatan perjalanan. Bagian terpenting dari heuristik ini adalah sejarah lisan melalui wawancara mendalam dengan saksi mata, tokoh masyarakat, sejarawan

²⁰Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto* (Jakarta: UI Press, 1986), hal.35

²¹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2005), hal. 89-93.

²² G.J. Renier, *Metode Sejarah, terjemahan Muin Umar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 112.

lokal, dan keluarga yang memiliki ikatan historis dengan pasanggarahan. Sumber sekunder dikutip dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan sejarah Mandailing Natal, sejarah kolonialisme di Sumatera, dan tipologi bangunan pasanggarahan²³.

2. Kritik Sumber

Setelah sumber-sumber dikumpulkan, proses pemilihan dilakukan untuk membedakan yang dapat digunakan dan yang tidak dapat digunakan. Tujuan dari proses pemilihan ini adalah untuk membedakan mana yang dapat digunakan dan mana yang tidak dapat digunakan sebagai subjek penelitian. Setelah melakukan kritik eksternal dan internal, kelayakan sumber untuk digunakan sebagai referensi dapat diputuskan.

- a. Kritik Eksternal : Kritik eksternal adalah usaha mendapatkan otensitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik eksternal ini mengarah kepada pengujian terhadap suatu sumber. Kritik eksternal terjadi pada waktu menentukan siapa saja orang yang pas untuk di wawancara pada saat mengumpulkan sumber.
- b. Kritik Internal : Kritik interen digunakan untuk menguji kredibilitas sumber, yang berarti apakah sumber tersebut dapat

²³ Tversky & Kahneman (1974).” Penilaian dalam Ketidak pastian” *Heuristik dan Bias. Sains*, Vol.185 Nol. 4157 (1974), hal. 1124-1131.

digunakan sebagai dasar penulisan. Sumber yang dianggap kredibel jika keterangannya diakui oleh lebih dari satu sumber. Penulis melakukan kritikan terhadap informasi yang dikumpulkan untuk menentukan apakah benar keasliannya atau tidak.

3. Interpretasi

Tahap menganalisis dan menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah terverifikasi. Pada langkah ini imajinasi dan interpretasi mempunyai peranan yang sangat diperlukan karena membantu dalam melakukan analisis secara mendalam terhadap permasalahan yang di hadapi. Pada tahap ini, peneliti merangkai jejak sejarah yang terpisah menjadi satu kesatuan arasi yang logis dan bermakna untuk menjawab rumusan masalah

4. Historiografi

Tahap akhir berupa penyajian hasil penelitian dalam bentuk tulisan karya ilmiah (skripsi). penulisan kisah sejarah yang berdasarkan pada fakta-fakta yang telah di berikan penafsirannya. Penulisannya yang dilakukan secara naratif-kronologis dan analitis, menceritakan sejarah pasanggarahan dari masa ke masa sampai beralih fungsi. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga mudah di pahami dan di mengerti oleh khalayak banyak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan laporan ini nantinya, penulis membuat sistematika penyajian yang terdiri dari empat bab

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulis.

BAB II : Menjelaskan sosial historis kotanopan, landasan konseptual Pasanggrahan kolonial, dan sosial politik Hindia Belanda di kotanopan

BAB III: Menganalisis sejarah Pembangunan dan fungsi Pasanggrahan Kotanopan sejak masa pendudukan kolonial Belanda hingga tahun 2013 serta faktor-faktor yang memengaruhinya

BAB IV : Merupakan bagian penutup yang mana pada bagian ini berisikan Kesimpulan dan Saran